



Checklist Persyaratan Izin Trase Jalan / Saluran (Pilih Salah Satu)

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (<i>Fotokopi</i>)WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>) Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD <ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMDSK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian		
5	Bukti Kepemilikan Tanah <ul style="list-style-type: none"><i>Fotokopi yang dilegalisasi Notaris/menunjukkan Asli</i>, Sertipikat Hak Milik/Sertipikat Hak Guna Bangunan/Sertipikat Hak Pakai /Sertipikat Hak Pengelolaan disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas, apabila terdapat perbedaan antara nama pemohon dengan yang tertera pada Sertipikat tanah maka dilampirkan AJB (Maksimal 2 kali pergantian kepemilikan), atau akta perjanjian kerjasama notarial atau sejenisnya. AJB (Maksimal 2 kali pergantian kepemilikan), atau akta perjanjian kerjasama notarial atau sejenisnya.Bila kepemilikan tanah berupa Girik/Verpounding/Surat tanah lainnya dilengkapi dengan Pernyataan tidak sengketa, Keterangan Riwayat tanah/Rekomendasi hak atas tanah dan surat penguasaan fisik tanah (<i>untuk penguasaan fisik tanah harus di tahun yang sama</i>) yang diketahui lurah (<i>Fotokopi yang di legalisasi</i>)Surat Keterangan Aset dari BPAD Provinsi DKI Jakarta atau KIB (Kartu inventaris barang) apabila lahan yang dimiliki tidak memiliki sertipikat tanah dan merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI JakartaJika terdapat perbedaan identitas/alamat antara permohonan dengan bukti kepemilikan tanah, maka di lengkapi dengan surat keterangan lurah (PM.1)Jika nama yang tertera pada bukti kepemilikan tanah sudah meninggal dunia, maka diperlukan surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Lurah dan Camat (<i>Fotokopi yang dilegalisasi lurah</i>)Surat Keterangan dari Bank yang menyatakan persetujuan untuk mengurus KRK dan/atau IMB, jika sertipikat sedang diagunkan.		
6	Foto lokasi yang dimohon (min. 3 sudut pandang yang berbeda) dan Peta Lokasi yang dimohon (diambil dari <i>google maps</i>)		
7	Gambar Rencana (<i>site plan</i> , denah, potongan, detail prinsip) dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>		
8	Fotokopi perizinan yang pernah terbit sebelumnya (KRK, RTL/GPA khusus Gambar Site Plan, IPPR/IPPT/SIPPT, maupun Persetujuan Prinsip/Izin Prinsip lainnya yang menunjang trace yang dimohon		
9	Ikhtisar tanah (untuk surat tanah ≥ 2 surat tanah), berupa Sketsa Peta/Denah tanah yang menginformasikan posisi tiap sertifikat tanah pada lahan yang dimohon, serta daftar Surat Tanah berisi Nomor dan Tanggal Sertifikat, Nama Pemegang Hak, Luas Tanah, Tanggal Masa Berakhir (untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan), dan Total Luas Tanah yang diakumulasikan dari seluruh sertifikat terlampir		
10	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR/IPPT/SIPPT) dan Ketetapan Rencana Kota (KRK) yang pernah terbit Sebelumnya - untuk Jalan/Saluran Kewajiban (Tertuang dalam IPPT/SIPPT)		

Kelengkapan Berkas :

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey/Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPSTP			
6	Petugas Penomoran			
7	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
29Hari Kerja	Rp. 0,-	Tidak ada masa berlaku, selama masih sesuai dengan peraturan yang berlaku

Referensi

Pemohon dapat memantau proses perizinan melalui website ptsp.jakarta.go.id/lacakberkas atau melalui *call center* 1500164

Catatan



Checklist Persyaratan Izin Trase

Trace Jembatan/Terowongan Penyeberangan Orang (JPO/TPO) diatas Tanah/dibawah tanah/diatas saluran (Pilih Salah Satu)

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)

No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (<i>Fotokopi</i>)WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>) Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD <ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMDSK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian		
6	Foto lokasi yang dimohon (min. 3 sudut pandang yang berbeda) dan Peta Lokasi yang dimohon (diambil dari <i>google maps</i>)		
7	Gambar Rencana (<i>site plan</i> , denah, potongan, detail prinsip) dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>		
8	Fotokopi perizinan yang pernah terbit sebelumnya (KRK, RTLB/GPA khusus Gambar Site Plan, IPPR/IPPT/SIPPT, maupun Persetujuan Prinsip/Izin Prinsip lainnya yang menunjang trace yang dimohon		
9	Izin Prinsip Jembatan dari Gubernur atau Kepala DPMPTSP		
10	Surat Rekomendasi dari SKPD terkait yang menunjang permohonan trace jembatan tersebut		

Kelengkapan Berkas :

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey/Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran			
7	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
29 Hari Kerja	Rp. 0,-	Tidak ada masa berlaku, selama masih sesuai dengan peraturan yang berlaku

Referensi

Pemohon dapat memantau proses perizinan melalui website ptsp.jakarta.go.id/lacakberkas atau melalui *call center* 1500164

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur



No. /

Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan Izin Trase

Trace Utilitas (air, listrik, gas) dan Jalur Transportasi (Pilih Salah Satu)

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)

No. Telp/HP : _____

Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (<i>Fotokopi</i>)WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>) Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD <ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMDSK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian		
6	Foto lokasi yang dimohon (min. 3 sudut pandang yang berbeda) dan Peta Lokasi yang dimohon (diambil dari <i>google maps</i>)		
7	Gambar Rencana (<i>site plan</i> , denah, potongan, detail prinsip) dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>		
8	Fotokopi perizinan yang pernah terbit sebelumnya (KRK, RTLB/GPA khusus Gambar Site Plan, IPPR/IPPT/SIPPT, maupun Persetujuan Prinsip/Izin Prinsip lainnya yang menunjang trace yang dimohon)		
9	Denah/Peta Jalur pada Peta Zonasi beserta keterangan lengkap		
10	Izin Prinsip yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta atau Kepala DPMPPTP terkait permohonan trace yang dimaksud		
11	Penetapan Lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta (khusus permohonan trace untuk jalur transportasi)		
12	Fotokopi SK Gub/Pergub/Keppres/Perpres/Kepmen/Ingub/Perda yang mendukung permohonan yang dimaksud		

Kelengkapan Berkas :

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey/Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPPTSP			
6	Petugas Penomoran			
7	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
29 Hari Kerja	Rp. 0,-	Tidak ada masa berlaku, selama masih sesuai dengan peraturan yang berlaku

ReferensiPemohon dapat memantau proses perizinan melalui website ptsp.jakarta.go.id/lacakberkas atau melalui *call center* 1500164**Catatan**

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur